

FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Muhammad Rizal

matipuntetappersib@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu Lemahnya tindak koreksi bagi sopir angkutan kota yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sehingga masih adanya angkutan kota yang tidak melengkapi dari segi administrasinya, dan Dinas Perhubungan tidak memiliki penjadwalan yang baku dalam hal pengawasan, sehingga pengawasan tidak berjalan dengan seefisien mungkin. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan, Kepala Seksi Jaringan Transportasi, Kepala UTPD. Terminal Ciamis, dan Petugas Khusus (PPNS) sebanyak 3 orang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan angkutan kota di Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti belum adanya penjadwalan secara rutin dan belum adanya tindak koreksi/sanksi yang tegas bagi awak angkutan yang melanggar. Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan yaitu: (1) Kurangnya tingkat kesadaran dari awak angkutan mengenai tertibnya angkutan kota (2) Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berikut anggarannya (3) terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan dalam menjalankan pengawasan yakni hanya bisa di cakupan terminal saja. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) Melakukan sosialisasi kepada awak angkutan dan melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan (2) Memaksimalkan pengawasan dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbatas dengan anggaran yang terbatas pula (3) Menjalin kerjasama yang baik untuk melakukan pengawasan di ruas jalan dengan didampingi oleh kepolisian.

Kata Kunci : Pengawasan, Angkutan Kota

A. PENDAHULUAN

Di Kabupaten Ciamis terdapat banyak sekali sarana transportasi umum yang bisa masyarakat pilih sesuai dengan keinginan masing-masing, seperti : Angkutan kota yang biasa masyarakat menyingkat dengan kata angkot, andes (angkutan perdesaan serta angkutan perbatasan yaitu angkutan umum yang melalui dua kabupaten atau lebih (AKDP) dan melalui antar kabupaten antar provinsi (AKAP).

Agar angkutan kota tertib dan berfungsi dengan baik, maka harus ada kesadaran terlebih dahulu dari para sopir angkutan kota serta dilakukannya pengawasan oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas perhubungan Ciamis berkoordinasi dengan UTPD terminal kabupaten Ciamis.

Pengawasan ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Melalui proses pemantauan ini

dimungkinkan akan dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Bahkan dengan adanya pengawasan ini dapat dengan mudahnya dilakukan evaluasi sejauhmana penyimpangan dan melakukan pembenahan berupa sebuah koreksi yang tepat agar penyimpangan tersebut dapat diatasi.

Adapun masalah yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penjajagan di lapangan, yaitu dengan indikasi bahwa belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota di Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari lemahnya tindak koreksi bagi sopir angkutan kota yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sehingga masih adanya angkutan kota yang tidak melengkapi dari segi administrasinya. Selain itu Dinas Perhubungan tidak memiliki penjadwalan yang baku dalam hal pengawasan,

sehingga pengawasan tidak berjalan dengan seefisien mungkin.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk memperhatikan angkutan kota, maka penulis berupaya untuk memberikan setitik sumbangan pemikiran dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Kota di kabupaten Ciamis.

B. LANDASAN TEORITIS

Definisi pengawasan

Menurut Siagian (2016: 112) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut : “pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Maksud dan Tujuan Pengawasan

Torang (2016 : 98) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tidak mengalami kendala yang berarti;
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program cukup efisien;
- c. Untuk mengetahui penyebab apabila terjadi penyimpangan;
- d. Untuk mencari pemecahan kendala, sehingga pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif, maka harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat pengawasan, sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus direncanakan mengenai apa, mengapa, siapa dimana, kapan dan bagaimana pengawasan dilakukan secara serius tanpa ragu-ragu;
- b. Pengawasan harus mencerminkan kebutuhan pengurus atau anggota organisasi yang perlu diawasi;
- c. Melaporkan hasil pengawasan tersebut;
- d. Pengawasan harus bersifat fleksibel namun tetap tegas;
- e. Pengawasan mengikuti pola organisasi;
- f. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin;
- g. Pengawasan disertai dengan perbaikan.

Sasaran Pengawasan

Siagian (2016 : 113) Sasaran-sasarannya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan

pola yang telah digariskan dalam rencana.

2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar *personallikes* dan *dislike*.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan.

Pengertian Angkutan Kota

Angkutan kota merupakan “salah satu bentuk dari angkutan umum yang mempunyai fungsi sebagai sarana pergerakan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, yang juga merupakan sarana transportasi alternatif didalam kota, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi”. (Andriariza : 2006).

Syarat Kelengkapan Kendaraan Angkutan Kota.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Syarat kelengkapan kendaraan angkutan kota sebagai berikut :

- a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan .
- b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempelkan dibagian depan dan belakang kendaran.
- c. Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan “**ANGKUTAN KOTA**”.
- d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- e. Tulisan standar pelayanan.
- f. Daftar tarif yang berlaku.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007 : 4) mengemukakan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober 2017 meliputi observasi/pembuatan matrik penelitian, pengumpulan matrik, penyeleksian matrik oleh DBS, pengumuman hasil seleksi matrik, penyusunan proposal penelitian, seminar proposal penelitian, masa bimbingan skripsi, ujian sidang skripsi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, yang beralamat di Jl. RD. Oto Iskandardinata No.2, Benteng, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
2. Kepala Bidang Angkutan
3. Kepala Bidang Lalu Lintas
4. Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan
5. Kepala UPTD Terminal Ciamis
6. Petugas Khusus (PPNS)

Prosedur

Dalam penelitian ini langkah melakukan penelitian dengan menggunakan indikator-indikator yang secara rinci dipaparkan melalui teori ahli sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Teori yang dijadikan acuan adalah syarat-syarat pengawasan yang efektif menurut Syamsi dalam Torang (2014 : 98), yang kemudian disesuaikan dengan keadaan di lokasi penelitian tersebut.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Martono (2015 : 64), Data (jamak; tunggal; datum) merupakan sekumpulan informasi; informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian atau sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yakni, sumber data

primer dan sumber data sekunder yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Selanjutnya sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah 8 orang antara lain :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis : 1 Orang
 2. Kepala Bidang Angkutan : 1 Orang
 3. Kepala Bidang Lalu Lintas : 1 Orang
 4. Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan : 1 Orang
 5. Kepala UPTD Terminal Ciamis : 1 Orang
 6. Petugas Khusus (PPNS) : 3 Orang
- Jumlah : 8 Orang

Dengan demikian jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang.

Kemudian Sumber data Sekunder adalah berasal dari dokumen-dokumen di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, dan buku-buku literatur, jurnal ilmiah, surat kabar dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara :
 - a. Observasi, pengamatan langsung yang dilakukan penelitian di lokasi penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis.
 - b. Wawancara, pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan terpilih yaitu Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Ciamis, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Bidang Lalu Lintas, Seksi Bina Usaha Angkutan, Kepala UPTD Terminal Ciamis, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis.
 - c. Pengumpulan dokumen-dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan, kebijakan, dll. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dll.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hubberman (Silalahi, 2012 : 339-341), menyebutkan bahwa “kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, Miles & Hubberman (Silalahi, 2012 : 339) menyampaikan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data terjadi secara terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.

- 2) Penyajian data, Miles & Hubberman (Silalahi, 2012 : 340) menyampaikan:

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, penulis dapat melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan-tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

- 3) Verifikasi, Miles & Hubberman (Silalahi, 2012 : 341) menyampaikan:

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekuuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan membatasi pengertian dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan fokus penelitiannya yaitu mengenai Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan kota di Kabupaten Ciamis. Adapun yang menjadi aspek kajian atau dimensi dalam pengawasan adalah , syarat-syarat pengawasan yang efektif menurut Syamsi dalam Torang (2014 : 98), diantaranya sebagai berikut :

1. Pengawasan harus direncanakan mengenai apa, mengapa, siapa dimana, kapan dan bagaimana pengawasan dilakukan secara serius tanpa ragu-ragu

Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana mengenai apa yang diawasi dari pengawasan angkutan kota sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan misalnya dengan menetapkan rencana yang berhubungan dengan kewajiban dan kelengkapan angkutan seperti KIR dan Kartu Pengawasan.

Selanjutnya indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana alasan melakukan pengawasan terhadap angkutan kota sudah dilakukan, dimana Dinas Perhubungan sudah menetapkan rencana tersebut, yaitu untuk kenyamanan berbagai pihak. Seperti menetapkan tujuan utama yaitu mentertibkan angkutan kota, lalu lintas, dan memberikan kenyamanan untuk penumpang.

Dan indikator ketiga yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana siapa yang akan menjalankan pengawasan sesuai dengan tupoksinya sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menetapkan rencana tersebut yang disusun secara resmi sesuai dengan tupoksinya yang dibebankan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas.

Untuk indikator keempat, yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana tempat untuk melakukan pengawasan angkutan kota sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan di terminal, dan untuk pengawasan di ruas jalan dapat dibantu oleh pihak kepolisian atau samsat.

Selanjutnya indikator kelima, yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana

untuk penjadwalan pengawasan angkutan kota, Dinas Perhubungan belum melakukan penyusunan penjadwalan, sehingga pengawasan hanya dilakukan dengan situasi yang ada.

Dan indikator keenam, yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana mengenai prosedur dalam pengawasan angkutan kota sudah dilakukan. Dimana terkadang dalam menetapkan rencana tersebut dilakukan melalui rapat bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terminal sebagai pelaksana di lapangan.

2. Pengawasan harus mencerminkan kebutuhan pengurus atau anggota organisasi yang perlu diawasi

Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan mengarahkan pengawasan untuk tertibnya administrasi angkutan sudah dilakukan, seperti adanya program memberikan penghargaan kepada awak angkutan yang selalu tertib administrasi angkutan kota sebagai motivasi untuk awak angkutan yang lainnya.

Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan berkerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan. Dimana Dinas Perhubungan sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, contohnya ketika akan melakukan operasi di ruas jalan, maka Dinas Perhubungan bekerjasama dengan kepolisian atau samsat.

3. Melaporkan hasil pengawasan tersebut

Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan menerima laporan secara tertulis dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal tentang hasil pengawasan di lapangan sudah dilaksanakan. Dimana Dinas Perhubungan selalu menerima laporan setiap bulan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terminal, meskipun terkadang laporan tersebut tidak tepat pada waktunya.

Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan menerima laporan secara lisan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal tentang hasil pengawasan di lapangan sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari adanya grup khusus untuk Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terminal, jadi disini terjadi komunikasi yang baik untuk memberikan laporan lisan.

4. Pengawasan harus bersifat fleksibel namun tetap tegas

Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan sesuai dengan situasi yang ada sudah dilakukan. karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan terkadang melakukan pengawasan dengan situasi yang ada, atau bersifat fleksibel. Seperti pada saat terjadinya kecelakaan, meskipun tidak ada jadwal atau rencana untuk melakukan pengawasan, tetapi Dinas Perhubungan untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan.

Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku juga telah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku.

5. Pengawasan mengikuti pola organisasi

Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan sesuai dengan struktur organisasi sudah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan selalu melakukan pengawasan dengan mengikuti pada struktur organisasi. seperti bidang angkutan melakukan pengawasan dalam ruang lingkup angkutan, baik itu angkutan umum, angkutan barang dan angkutan jalan.

Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal sudah dilakukan, seperti adanya jadwal apel untuk setiap bulan sebagai ajang untuk mempererat kerjasama yang baik antara Dinas Perhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terminal.

6. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin

Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan memperhatikan penghematan dana sudah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan dana yang terbatas, namun pengawasan tetap berjalan. Hal ini dapat diminimalisir dengan memenuhi undangan dari kepolisian untuk melakukan operasi gabungan di ruas jalan.

Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan memperhatikan penghematan waktu telah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan terkadang melakukan

pengawasan dengan waktu yang singkat, sekiranya sudah dianggap cukup maka tidak melakukan pengawasan setiap hari.

7. Pengawasan disertai dengan perbaikan

Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara terus menerus sudah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan berupaya untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus walaupun tanpa jadwal yang rutin dan dengan jumlah petugas yang terbatas.

Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan melakukan tindak koreksi terhadap sopir yang melakukan kesalahan belum dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan tidak memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana selalu ada alasan untuk memaafkan, padahal sanksi itu perlu dilakukan untuk membuat awak angkutan jera dan lebih memperhatikan lagi kesalahannya.

Hambatan-hambatan Mengenai Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Kota di kabupaten Ciamis

Untuk mengetahui hambatan-hambatan mengenai fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis, penulis jelaskan melalui dimensi-dimensi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengawasan harus direncanakan mengenai apa, mengapa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana pengawasan dilakukan secara serius tanpa ragu-ragu

Berdasarkan penelitian bahwa terdapat hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan dengan merencanakannya. Hambatan yang terjadi dalam indikator dalam menetapkan rencana mengenai apa yang diawasi dari angkutan kota diantaranya tingkat kesadaran dari awak angkutan mengenai tertibnya angkutan kota, hal ini ditunjukkan dengan pengusaha dan awak angkutan yang tidak melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dimilikinya, sehingga sering terjadi ketidaktahuan mengenai keadaan yang sudah tidak layak.

Selanjutnya indikator penetapan rencana dari alasan melakukan pengawasan angkutan kota hambatannya adalah adanya ketidaktahuan serta kesadaran dari masyarakat maupun awak angkutan yang masih menaikan penumpang pada

tempatnyanya, hal ini ditunjukkan dengan sering terjadinya proses naik turun penumpang di lampu merah atau di pasar, sehingga mengganggu untuk ketertiban lalu lintas, seharusnya naik turun penumpang itu di terminal.

Dan indikator penetapan rencana dari siapa yang akan melakukan pengawasan angkutan kota hambatannya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, seperti untuk PPNS.

Untuk indikator penetapan rencana mengenai tempat untuk melakukan pengawasan angkutan kota hambatannya adalah kurang luasnya tempat untuk melakukan pengawasan karena untuk wilayah Dinas Perhubungan hanya mencakup di terminal saja.

Selanjutnya indikator penetapan rencana untuk penjadwalan dalam melakukan pengawasan hambatannya adalah masih saja terjadi adanya kebocoran berita dalam pelaksanaan razia angkutan, sehingga dalam penjarangan angkutan hanya sedikit.

Dan untuk indikator penetapan rencana mengenai prosedur dalam pengawasan hambatannya yaitu kurangnya pemahaman dari petugas dilapangan mengenai prosedur dalam melakukan pengawasan.

2. Pengawasan harus mencerminkan kebutuhan pengurus atau anggota organisasi yang perlu diawasi

Dalam dimensi pengawasan yang harus mencerminkan kebutuhan pengurus organisasi ini, untuk indikator dalam mengarahkan pengawasan untuk tertibnya administrasi angkutan kota hambatannya yaitu Kurangnya perhatian dari pihak pengusaha ataupun awak angkutan yang sadar akan pentingnya administrasi angkutan kota.

Dan untuk indikator kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengawasan ini hambatannya yaitu sulitnya menyinergikan antara urusan kepolisian dengan dinas perhubungan, untuk hambatan yang lebih sulit tidak ada, hanya ini sebagai hambatan yang sekiranya pernah terjadi sehingga terkadang pelaksanaan pengawasan belum dilakukan dengan optimal karena sulitnya menentukan jadwal untuk melakukan pengawasan di ruas jalan secara gabungan.

3. Melaporkan hasil pengawasan tersebut

Dalam dimensi ini, untuk indikator penerimaan laporan secara tertulis dari UPTD Terminal tentang hasil pengawasan dilapangan hambatanannya adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang terdapat di UPTD berupa alat untuk pembuatan laporan tertulis, sehingga terjadi keterlambatan penyampaian laporan ke dinas perhubungan. Untuk hambatan yang terlalu sulit tidak ada, karena masalah seperti ini masih bisa diminimalisir sehingga tidak mengganggu untuk pekerjaan lainnya.

Dan untuk indikator penerimaan laporan secara lisan dari UPTD Terminal tentang hasil pengawasan dilapangan hambatanannya yaitu Hambatanannya ialah tidak adanya anggaran khusus untuk menunjang alat komunikasi dalam penyampaian laporan secara lisan.

4. Pengawasan harus bersifat fleksibel namun tetap tegas

Dalam dimensi pengawasan yang harus bersifat fleksibel dengan indikator pengawasan yang dilakukan sesuai dengan situasi yang ada hambatanannya yaitu hanya perihal dengan keadaan cuaca yang tidak bisa diprediksikan dan memungkinkan untuk dilaksanakannya pengawasan, dan untuk selebihnya tidak ada hambatan.

Dan untuk indikator pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku hambatanannya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai.

5. Pengawasan mengikuti pola organisasi

Dalam dimensi pengawasan yang mengikuti pola organisasi, dengan indikator pengawasan yang dilakukan sesuai dengan struktur organisasi hambatanannya yaitu Hambatanannya karena keterbatasannya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dan untuk indikator pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan UPTD terminal hambatanannya yaitu kurangnya melakukan koordinasi yang hanya dilakukan satu bulan, misalkan apel yang di lakukan pada minggu pertama dengan UPTD terminal.

6. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin

Dalam dimensi pengawasan dilakukan seefisien mungkin dengan indikator pengawasan dengan memperhatikan penghematan dana hambatanannya adalah anggaran nya terbatas maka dalam pelaksanaan pengawasannya juga tidak terlalu sering dilakukan.

Dan untuk indikator pengawasan dengan memperhatikan penghematan waktu Hambatanannya ialah mengenai petugas dilapangan yang kurang memadai, sehingga menjadikan sulitnya melakukan penghematan waktu.

7. Pengawasan disertai dengan perbaikan

Dalam dimensi pengawasan disertai dengan perbaikan dengan indikator pengawasan yang dilakukan secara terus menerus hambatanannya adalah masih kurangnya sumber daya manusia seperti sedikitnya personil dilapangan dan khususnya PPNS yang tak sebanding dengan jumlah angkutan.

Dan untuk indikator tindak koreksi terhadap sopir yang melakukan kesalahan hambatanannya adalah kurangnya kesadaran awak angkutan perihal dengan kelengkapan angkutan, kenyamanan dan keselamatan penumpang.

Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Mengenai Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan mengenai fungsi dinas perhubungan dalam pengawasan angkutan kota di Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus direncanakan mengenai apa, mengapa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana pengawasan dilakukan secara serius tanpa ragu-ragu

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menetapkan rencana mengenai apa tujuan dari pengawasan angkutan kota yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada awak angkutan dan melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan sebagai himbauan untuk lebih memperhatikan kelengkapan yang menjadi kewajiban yang harus dijalankan.

Selanjutnya indikator penetapan rencana dari alasan melakukan pengawasan angkutan kota, upayanya yaitu melakukan pendekatan kepada awak angkutan bahwa mereka harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk keselamatan bersama.

Dan indikator penetapan rencana dari siapa yang akan melakukan pengawasan angkutan kota, upayanya dengan memaksimalkan pengawasan dengan jumlah PPNS yang terbatas, dan menjalin kerjasama

dengan kepolisian untuk melakukan operasi gabungan.

Untuk indikator penetapan rencana mengenai tempat untuk melakukan pengawasan angkutan kota, upayanya yaitu dengan melakukan pengawasan di ruas jalan dengan didampingi oleh kepolisian atau samsat.

Indikator penetapan rencana untuk penjadwalan dalam melakukan pengawasan angkutan kota, upayanya adalah membuat strategi baru supaya dapat terjaring dengan semaksimal mungkin. Misalnya dengan melakukan pengebakan.

Dan indikator penetapan rencana mengenai prosedur dalam pengawasan angkutan kota, upayanya yaitu dengan mengingatkan kembali kepala petugas lapangan untuk memahami prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dalam melakukan pengawasan.

2. Pengawasan harus mencerminkan kebutuhan pengurus atau anggota organisasi yang perlu diawasi

Dalam dimensi ini, dengan indikator pengarahan pengawasan untuk tertibnya administrasi angkutan, upayanya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik itu pihak awak angkutan maupun dengan pihak perusahaan. Agar tertibnya administrasi angkutan kota dapat dukungan dari berbagai pihak demi terwujudnya tujuan ini.

Dan untuk indikator kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengawasan, upayanya adalah meynergikan antara jadwal dinas perhubungan dengan kepolisian, sehingga razia gabungan bisa dilakukan ketika ada jadwal yang memungkinkan untuk melakukan razia gabungan tersebut.

3. Melaporkan hasil pengawasan tersebut

Dalam dimensi ini, dengan indikator penerimaan laporan secara tertulis dari UPTD Terminal tentang hasil pengawasan di lapangan, dengan berupaya agar laporan dapat tersusun tepat waktu dan dapat disetorkan tepat waktu pula.

Dan untuk indikator penerimaan laporan secara lisan dari UPTD Terminal tentang hasil pengawasan di lapangan, upayanya dengan melakukan komunikasi yang baik dengan menggunakan alat komunikasi dan menggunakan uang pribadi atau dana pribadi untuk melakukan laporan secara lisan ini.

4. Pengawasan harus bersifat fleksibel namun tetap tegas

Dalam dimensi pengawasan harus bersifat fleksibel dengan indikator pengawasan yang dilakukan sesuai dengan situasi yang ada, upayanya yaitu selalu melakukan pengawasan secara maksimal dengan situasi yang ada di lapangan.

Dan untuk indikator pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku, upayanya adalah dengan memaksimalkan pengawasan, meskipun untuk sarana dan prasarana masih dianggap kurang sehingga dalam melakukan pengawasan dengan alat yang seadanya tapi harus mengacu pada peraturan yang ada.

5. Pengawasan mengikuti pola organisasi

Dalam dimensi pengawasan mengikuti pola organisasi dengan indikator pengawasan yang dilakukan sesuai dengan struktur organisasi, upayanya yaitu pengawasan ini selalu dilakukan dengan struktur organisasi yang ada sesuai dengan tugas pokok fungsinya walaupun dengan jumlah petugas yang ada atau yang terbatas.

Dan untuk indikator melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan UPTD terminal, upayanya adalah dengan adanya jadwal apel untuk setiap bulan sebagai ajang untuk mempererat kerjasama yang baik antara dinas perhubungan dengan UPTD terminal sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara maksimal.

6. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin

Dalam dimensi pengawasan dilakukan seefisien mungkin dengan indikator pengawasan dengan memperhatikan penghematan dana, upayanya yaitu melakukan pengawasan secara maksimal meskipun anggaran yang kurang memadai dan dengan melakukan operasi gabungan dengan kepolisian supaya anggaran yang dikeluarkan lebih sedikit.

Dan untuk indikator pengawasan dengan memperhatikan penghematan waktu, upayanya yaitu menghemat waktu dalam satu hari untuk razia tidak dilakukan dengan terfokus pada satu titik, tapi dengan beberapa titik sehingga dalam waktu satu hari bisa dilakukan di berbagai titik.

7. Pengawasan disertai dengan perbaikan

Dalam dimensi pengawasan disertai dengan perbaikan dengan indikator pengawasan yang dilakukan secara terus menerus, upayanya yaitu pengawasan tetap dilakukan walaupun dengan jumlah PPNS yang sedikit, hal ini dilakukan untuk

mencapai pengawasan agar tetap berjalan secara terus menerus.

Dan untuk indikator tindak koreksi terhadap sopir yang melakukan kesalahan, upayanya adalah menjalin komunikasi yang baik, baik itu dengan awak angkutan ataupun dengan pihak perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengawasan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti belum adanya penjadwalan secara rutin dan belum adanya tindak koreksi/sanksi yang tegas bagi awak angkutan yang melanggar.

Hambatan-hambatan mengenai fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis diantaranya kurangnya tingkat kesadaran dari awak angkutan mengenai tertibnya angkutan kota, Masih terbatasnya petugas di lapangan seperti masih sedikitnya jumlah PPNS. Selain itu, masih terbatasnya anggaran, serta terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan, yang hanya mencakup di wilayah terminal.

Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan mengenai fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis diantaranya melakukan sosialisasi kepada awak angkutan dan melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan, memaksimalkan pengawasan dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada dan memanfaatkan jumlah anggaran yang tersedia seefisien mungkin. Selanjutnya meningkatkan jalinan kerjasama serta koordinasi yang baik dengan kepolisian dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan pengawasan.

Saran

Sebaiknya Dinas Perhubungan menyusun agenda atau jadwal pelaksanaan pengawasan secara rutin, dan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal dan pihak pengusaha angkutan kota agar memperhatikan ketertiban administrasi angkutan kota, serta diharapkan dinas perhubungan mampu meningkatkan kegiatan pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis maka perlu melakukan perbaikan yang terus-menerus dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap awak angkutan yang melakukan pelanggaran.

Agar upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis dapat berjalan secara maksimal, perlu diadakannya sosialisasi dan komunikasi yang lebih intens terhadap pengusaha angkutan untuk bersama-sama mewujudkan ketertiban angkutan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kadarisman, M. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Moleong, L.J. 2007.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Pasalong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta
- Ruliana, Poppy. 2016. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Raja Gafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suadi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Raja Gafindo Persada